

DAFTAR REFERENSI

- Abu Achmadi & Cholid Narbuko. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali Achmad Chomzah. (2016). *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertipikat dan Permasalahannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- AP. Parlindungan. (1988). *Pendaftaran Tanah Tanah dan Konfersi hak milik atas tanah menurut UUPA*. Bandung: Alumni.
- A. P. Parlindungan. (2016). *Pendaftaran tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Boedi Harsono. (2005). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksaaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Benny Bosu. (2018). *Pembaharuan Terbaru Sertifikat (Tanah, Tanggungan dan Codominium)*. Jakarta: Mediatama Saptakarya.
- Chandra S. (2019) *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah : Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan*. Jakarta: Grasindo.
- Edy Ikhsan. (2015). *Konflik Tanah Ulayat Dan Pluralisme Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hernan Hermit. (2014). *Cara Mengelola Sertifikat Tanah Hak Milik. Tanah Negara dan tanah Pemda, Teori dan Praktek pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Mandar maju.
- J Gerard Jansen. (1925). *Grandrechten In Deli*. Oostkust: van Institut.
- John M. Echols & Hassan Shadily. (1992). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Lili Rasjidi dan I. B Wyasa Putra. (1993). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Markus Gunawan (2011). *Provinsi Kepulauan Riau*. Batam: Titik Cahaya Elka.
- M. Marwan dan Jimmy P. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Oksep Adhayanto, (2021), Rekonstruksi Nilai-Nilai Masyarakat Lokal dalam Semangat Otonomi Daerah Menuju Penguatan Sistem Hukum Nasional,

Research Gate, hlm. 270-271.

Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Saleh Adiwinata. (2011). *Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Alumni.

Siahaan Marihot Pahala. (2015) *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Slamet Riyadi. (2020). *Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Tumpang Tindih*. Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tegas.

Soedharyo Soimin. (2015). *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sonny Keraf. (1998). *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.

Sudikno Mertokusumo. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Supriadi. (2009). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Urip Santoso. (2016). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan Kedua*. Jakarta: Prenada Media.

Usman Riansa & Abdi. (2012). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Wahid, Muchtar. (2008). *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Penerbit Republika.

Wahyu Sasongko. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Wantjik Saleh. (2016). *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bakhtiar Dwiky Damara. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Sertifikat Ganda*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Farin Widinenda. (2005). *Sengketa Penguasaan Tanah Hak Guna Bangunan Dan Upaya Penyelesaiannya, Studi Analisis Kasus PT. Putera Sejahtera Pioneerindo (PT. PSP, Tbk) di Medan*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Miftahul Sakinah Assyafiah. (2018) *Aspek Hukum Agraria Terkait Peralihan Bekas Tanah Adat Kekaerangan Menjadi Hak Milik Perorangan*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Muhammad Arief Asyari Zulad. (2017). *Strategi Pendaftaran Tanah Grand Sultan Oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

KBBI Daring. *Analisis*. <http://kbbi.web.id/analisis>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2022. Pukul 19.54 WIB.